

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Jl. Mayjen Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur

Sumber : Sindo	Hari/Tgl : Selasa, 01 Maret 2022	Hlm/Kol : 11/1
Subjek : Perang (Hukum internasional)		Bidang : ^{HK} internasional

Rusia Serang Ukraina, Ujian Polugri Indonesia

YUDDY CHRISNANDI

Guru Besar Ilmu Politik
Universitas Nasional, Duta Besar RI
di Kiev (2017-2021)

Pada 24 Februari 2022 pagi hari waktu Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan penyerangan skala penuh ke wilayah Ukraina dengan menembakkan 160 misil ke berbagai lokasi di wilayah kedaulatan negara tersebut. Imbauan masyarakat negara-negara Eropa, Amerika Serikat hingga Asia-Pasifik agar Rusia tidak memulai perang sama sekali diabaikan.

Rusia menampilkan dirinya terlibat langsung dalam masalah separatisme internal wilayah timur (*eastern*) Ukraina (*Dombas Region: Luhank & Donets*) setelah sejak meletusnya gerakan separatisme pada 2014 selalu menyangkal keterlibatan mereka.

Apa pun alasan yang disampaikan Presiden Rusia menyerang wilayah kedaulatan Ukraina tidak dapat dibenarkan oleh hukum internasional yang dirumuskan di dalam piagam PBB Pasal 2 ayat 4 mengenai penggunaan kekuatan (*use of force*) terhadap wilayah kedaulatan negara lain yang bukan untuk membela/mempertahankan diri. Setiap anggota PBB, termasuk Rusia dan Ukraina, diwajibkan menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa, bukan dengan kekuatan senjata.

Penyerangan itu juga tidak dapat diterima dengan nalar akal sehat, suatu bentuk penyerangan militer terhadap suatu negara yang bukan merupakan ancaman terhadap negara lain. Tindakan Rusia tentu tidak dapat diterima oleh masyarakat dunia yang cinta damai, termasuk Indonesia. Hukum internasional secara tegas telah mengatur bahwa agresi merupakan sebuah kejahatan serius yang menjadi perhatian komunitas internasional.

Berbagai upaya negara Eropa yang memprakarsai pembicaraan damai Rusia-Ukraina melalui *Minsk Agreement* maupun hadirnya OSCE (*Organization for Security and Cooperation of Europe*) di mana Jerman dan Prancis menjadi penengahnya sudah dilakukan sejak 2014. Sayangnya kesepakatan yang dibuat dianggap selalu dilanggar oleh kedua belah pihak dan dianggap menguntungkan salah satu pihak dari perspektif yang berbeda. Sementara itu tidak ada langkah-langkah yang lebih nyata dari negara-negara besar di Eropa seperti Jerman dan Prancis, juga Amerika Serikat yang merupakan sekutu Ukraina dalam membantu Ukraina mengatasi masalah keamanan negerinya dari ancam-

an Rusia.

Jika kita melihat sedikit ke belakang, apa yang menyebabkan konflik ini berlangsung memanah hingga Rusia menyerang Ukraina? Berawal dari tergulingnya Presiden Ukraina Keempat Victor Yanukovich pada 2014 yang pro-Rusia, yang membatalkan hasil referendum kehendak rakyat Ukraina bergabung dengan masyarakat Uni Eropa. Yanukovich melarikan diri ke Rusia hingga saat ini. Presiden selanjutnya Petro Poroshenko yang dilantik pada Juni 2014 atas hasil pemilihan umum dihadapkan pada okupasi semenanjung Crimea oleh Rusia dengan alasan referendum rakyat Crimea yang memilih bergabung dengan Rusia dan pemberontakan gerakan separatisme di wilayah timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Kedua front konflik tidak dapat diatasi oleh kekuatan militer saat itu. Ukraina dan masyarakat dunia meyakini bahwa Rusia berada di belakang gerakan separatisme dan secara terbuka mencaplok Crimea yang berada dalam kedaulatan Ukraina tanpa perlawanan perang. Di bawah Presiden Kelima Ukraina Petro Poroshenko, dia melanjutkan upaya Ukraina

Sambungan

Sumber : Sindo

Hari/Tgl : Selasa, 01 Maret 2021

Hlm/Kol : 14/1

bergabung dengan MEE dan NATO. Hal ini tentu tidak disukai oleh Rusia. Terlebih mendaftarnya Ukraina menjadi anggota NATO dianggap sebuah ancaman keamanan bagi kepentingan pertahanan Rusia yang langsung berbatasan dengan Ukraina.

Saat pertama kali tiba di Ibu Kota Kiev, musim semi April 2017, saya berusaha mengenal budaya dan sosiologi masyarakat Ukraina, selain mencermati keadaan sosial ekonomi dan keamanan negara tersebut. Beberapa bulan kemudian, kami yang bertugas di KBRI Kiev menyimpulkan bahwa status negara zona kuning berbahaya



KORAN SINDO/WAWAN BAS

bagi diplomat dan WNI yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar dicabut. Ukraina aman, nyaman, dan damai. Sepanjang lebih dari empat tahun melaksanakan tugas diplomatik di Ukraina, diperoleh kesan yang dalam akan masyarakatnya yang ramah, sederhana, dan cinta damai. Bahkan terhadap wilayah kedaulatannya yang dirampas pun Ukraina tidak menggunakan kekuatan bersenjata untuk merebutnya. Yang Ukraina lakukan di dalam wilayahnya di timur adalah menjaga agar gerakan separatis tidak masuk lebih jauh ke dalam wilayah Ukraina yang telah disepakati dalam perjanjian Minks oleh para pihak berkonflik, termasuk Rusia. Dalam kurun waktu 2017-2021, situasi keamanan dan

stabilitas ekonomiserta politiknya cukup kondusif, tidak ada keraguan dan kekhawatiran hidup di negara tersebut. Saya bersama para kepala perwakilan negara-negara sahabat lainnya beberapa kali mengunjungi wilayah perbatasan konflik, suasananya biasa saja. Justru kekhawatiran akan meletusnya perang terjadi setelah dalam tiga bulan terakhir ini Amerika Serikat dan NATO menarasikan akan terjadinya perang Rusia-Ukraina tanpa kehadiran mereka di wilayah Ukraina menghadapi serangan Rusia saat ini.

Dunia tidak menghendaki lagi terjadinya peperangan dengan alasan apa pun. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui jalan diplomasi yang damai. Serangan yang baru dua hari berlangsung sudah menimbulkan dampak ekonomi dunia, harga minyak dan gas bumi sebagai sumber energi melejit. Transportasi udara dan laut di kawasan tersebut terhenti. Hubungan diplomatik antarnegara terganggu. Sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Rusia berdampak luas. Jika berlarut, dunia merasakan dampaknya dalam waktu dekat.

Kini masyarakat Ukraina pada umumnya dan WNI kita yang tinggal di sana dalam keadaan khawatir akan keadaan yang lebih buruk di hari mendatang. Antrean pengisian BBM sudah memanjang, supermarket sudah mulai diserbu pembeli bahan kebutuhan pokok,

gerai-gerai pengambilan mesin uang dipenuhi antrean. Amerika Serikat sudah memulangkan semua warganya dari wilayah Ukraina, diikuti negara-negara lain.

KBRI di Kiev mulai mengevakuasi seratusan WNI ke Gedung KBRI yang relatif lebih aman sebagai tempat perlindungan. Beberapa kota besar di Ukraina seperti Odessa, Kharkiv, Chernihiv, Kyiv Oblast, dan lainnya sudah dihujani tembakan misil Rusia. Ratusan ribu penduduk Ukraina mulai bergerak ke perbatasan Polandia untuk mencari tempat yang aman, sebagian lainnya berlindung di stasiun-stasiun kereta api bawah tanah jika mendengar sirine peringatan.

Serangan Rusia terhadap Ukraina sesungguhnya adalah serangan untuk Rusia sendiri. Negara-negara di dunia akan memberi sanksi yang berat kepada Rusia atas keputusan presidennya menyerang Ukraina tanpa landasan objektif.

Di tengah keraguan Ukraina yang merasa sendirian membela dirinya menghadapi kekuatan militer Rusia yang digdaya dan arogansi Rusia yang tidak menghormati hukum internasional, Indonesia sebagai negara netral yang bersahabat dengan keduanya memiliki momentum menjadi penengah.

Indonesia memiliki hubungan historis dengan kedua negara di era kejayaan Uni Soviet. Hubungan ekonomi dagang antara Indonesia dengan keduanya terus meningkat prospektif (USD1,3 T dengan Ukraina dan

USD2,7 T dengan Rusia, 2021). Indonesia adalah pasar ekonomi masa depan bagi keduanya. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, penggaas Gerakan Nonblok, pemimpin ASEAN, Ketua G-20 Tahun 2022, peran diplomasi Indonesia dibutuhkan oleh kepentingan kedua negara. Lebih jauh dari itu, Indonesia menganut nilai-nilai universalisme dalam hubungan internasionalnya yang menentang segala bentuk agresi, pemaksaan kehendak, penggunaan kekuatan bersenjata, intervensi wilayah, dan diplomasi jalan damai dalam penyelesaian sengketa.

Inilah politik luar negeri (polugri) Indonesia yang bebas dan aktif. Pembelaan kita karena prinsip-prinsip internasional yang kita anut. Bukan saatnya mengambil posisi di tengah saat kita tahu kebenaran ada di sebelah kiri atau kanan kita. Indonesia tidak memiliki beban dan ketergantungan kepada Ukraina maupun Rusia. Indonesia bisa mengambil sikap atas dasar keyakinan kebenaran yang kita anut. Inilah ujian bagi Indonesia di tengah perang Ukraina yang membela diri dari serangan Rusia. Sekaligus amanat konstitusi kita bagi pemerintah untuk turut serta menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

Kita meyakini para pemimpin kita sadarkan hal ini, tergerak untuk melakukan tindakan diplomatiknya menghentikan perang di Ukraina demi perdamaian dunia. □